## **BAB III**

### TEMUAN DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

### A. Temuan

Sebagai media yang mengikuti isu atas keterkaitan Habib Rizieq dengan dimulanya atas kasus Ahok yang membawa unsur "Agama" dengan konsekuensi jatuhnya beliau sebagai Gubernur yang dimandati oleh Warga DKI Jakarta. Demikian nama Habib Rizieq mulai sering disebutkan jikalau ada unsur agama yang dikaitkan dengan kasus ucapan Gubernur DKI Jakarta yang memiliki nama panggilan akrab Ahok.

Penelitian ini menggunakan model analisis Robert N. Entman. Dalam model analisisnya, Entman menekankan pada empat perangkat framing untuk melihat suatu berita. Perangkat tersebut adalah *Define Problem* perangkat ini digunakan untuk melihat bagaimana isu atau peristiwa itu terjadi, sebagai apa isu atau masalah itu. Dengan kata lain perangkat ini mendefiniskan gagasan pokok suatu teks. Kemudian *Diagnose Causes*, perangkat ini untuk melihat apa yang menyebabkan peristiwa itu terjadi dan siapa yang dianggap sebagai penyebab masalah. Selanjutnya *Moral Judgement*, perangkat ini menjelaskan bagaimana suatu teks memunculkan nilai moral untuk menjelaskan masalah, dan yang terakhir *Treatment Recommendation* yaitu, tentang tawaran untuk mengatasi masalah atau isu tersebut.

Peneliti memilih dari 2 media, yakni Detik.com dan Tempo.co.

- 1. Kategorisasi "Tindakan Lembaga";
  - a) Berita : 1

Tanggal: Jumat 16 Maret 2018; 13:12 WIB

Judul : FPI Demo di Gedung Tempo, LBH Pers: Tak Boleh Ada Intimidasi

"Front Pembela Islam (FPI) berencana menggelar unjuk rasa di gedung Tempo, Jalan Palmerah Barat, Jakarta Selatan, Jumat, 16 Maret 2018. Aksi ini untuk memprotes karikatur yang dimuat majalah Tempo edisi 26 Februari 2018. Alasannya, karikatur itu dianggap telah menghina dan merendahkan pemimpin FPI, Rizieq Shihab.

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers berpendapat, karikatur yang dibuat Tempo merupakan sebuah karya jurnalistik. Semua karya jurnalistik dilindungi undang-undang dan konstitusi, khususnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Pasal 28 F UUD 1946.

"Pers adalah lembaga kontrol yang menjunjung tinggi nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum dan hak asasi manusia, serta menghormati kebinekaan," kata Direktur Eksekutif LBH Pers Nawawi Bahrudin dalam keterangan tertulis yang diterima Tempo.

Nawawi menilai, jika ada pihak atau kelompok yang merasa keberatan atau dirugikan dengan sebuah karya jurnalistik, yang bersangkutan seharusnya menempuh jalur sengketa jurnalistik, yaitu dengan memberikan hak jawab atau hak koreksi. Pihak yang dirugikan itu juga bisa mengadukan media atau karya jurnalistik tersebut kepada Dewan Pers. "Karena Dewan Pers-lah yang berhak menilai dan memiliki kewenangan menilai, apakah sebuah karya jurnalistik tersebut telah melanggar kode etik jurnalistik atau tidak," ucapnya

Terkait dengan rencana unjuk rasa yang digelar FPI, Nawawi menuturkan demonstrasi adalah hak asasi manusia yang dijamin konstitusi. "Namun berunjuk rasa dengan niat akan menduduki, memaksa untuk mengakui kesalahan, mengintervensi ruang redaksi, dan melakukan bentuk intimidasi lain adalah hal yang tidak dibenarkan oleh hukum," katanya. Jadi, jika hal tersebut terjadi, aparat penegak hukum sudah seharusnya bertindak demi melindungi pers dan kemerdekaan pers. "Itu sama dengan melindungi wujud kedaulatan rakyat.""

(https://metro.tempo.co/read/1070292/fpi-demo-di-gedung-tempo-lbh-pers-tak-boleh-ada-intimidasi/full&view=ok, diakses pada tanggal 14 Juni 2019)

*Define Problem*, dalam berita ini. Kasus yang di utamakan adalah para anggota ormas dari FPI (Front Pembela Islam) akan melakukan demonstrasi dan unjuk rasa yang sekaligus akan mencoba menduduki kantor redaksi Tempo.co dengan alasan tidak terima atas karikatur Habib Rizieq Shihab yang dimuat di harian Tempo.co pada bulan

Februari 2018. Demonstrasi yang akan disertai dengan aksi unjuk rasa dilakukan pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2018 di kantor redaksi Tempo.co yang beralamat di jalan Palmerah Barat, Jakarta Selatan. Yang tercantum pada paragraf I dalam berita tersebut.

"Front Pembela Islam (FPI) berencana menggelar unjuk rasa di gedung Tempo Jalan Palmerah Barat, Jakarta Selatan, Jumat, 16 Maret 2018. Aksi ini untuk memprotes karikatur yang dimuat majalah Tempo edisi 26 Februari 2018. Alasannya, karikatur itu dianggap telah menghina dan merendahkan pemimpin FPI, Rizieg Shihab."

Diagnoses Cause, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) berpendapat bahwa karikatur yang terbit di harian Tempo pada bulan Februari 2018 itu termasuk sebuah karya jurnalistik dan itu semua di atur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Pasal 28 F UUD 1946. Bahwa semua yang telah terjadi di dalam karya jurnalistik sudah melewati tahapan hingga mampu mencapai terbit nya sebuah karya. Dan Lembaga Pers juga mengawasi sekaligus bertanggung jawab atas setiap karya yang di terbitkan oleh media manapun untuk menciptakan kemerdekaan dan kebebasan dalam pers yang mampu berperan penting untuk menciptakan demokrasi di dalam pemberitaan sesuai dengan yang tertulis dalam Undang Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. Dan sekaligus ada kode etik juga yang harus tetap di patuhi kepada setiap pencipta sebuah karya jurnalistik tersebut. Seperti yang tertulis pada paragraf 2 dan 3.

"Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers berpendapat, karikatur yang dibuat Tempo merupakan sebuah karya jurnalistik. Semua karya jurnalistik dilindungi undang-undang dan konstitusi, khususnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Pasal 28 F UUD 1946."

"Pers adalah lembaga kontrol yang menjunjung tinggi nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum dan hak asasi manusia, serta menghormati kebinekaan," kata Direktur Eksekutif LBH Pers Nawawi Bahrudin dalam keterangan tertulis yang diterima Tempo."

*Moral Judgement* demonstrasi merupakan hak asasi manusia dalam kehidupan demokrasi di negara Indonesia yang dilindungi sekaligus di jamin oleh konstitusi. Tapi sebuah hal yang mengenai unjuk rasa atau hal yang lebih menyudutkan sepihak dengan

contoh mengintimidasi lawan atau bahkan sampai mengambil keputusan sepihak tanpa adanya jalur hukum itu merupakan sebuah tindakan yang melanggar hukum dan tidak di benarkan. Maka dari itu di lokasi tersebut tetap di kerahkan aparat sebagai peredam dari aksi marah nya dari pihak FPI sehingga tidak sampai terjadi nya hal yang tidak diinginkan oleh pihak Tempo maupun dari pihak FPI itu sendiri demi tercapainya sebuah jalan damai untuk kedua belah pihak. Hal itu tertulis pada paragraf 5.

"demonstrasi adalah hak asasi manusia yang dijamin konstitusi. "Namun berunjuk rasa dengan niat akan menduduki, memaksa untuk mengakui kesalahan, mengintervensi ruang redaksi, dan melakukan bentuk intimidasi lain adalah hal yang tidak dibenarkan oleh hukum," katanya. Jadi, jika hal tersebut terjadi, aparat penegak hukum sudah seharusnya bertindak demi melindungi pers dan kemerdekaan pers. "Itu sama dengan melindungi wujud kedaulatan rakyat."

Treatment Recommendations Nawawi Bahrudin mengasumsikan bahwa tetap jalur hukum merupakan sebuah solusi yang tepat untuk kasus yang terjadi ini. Dengan cara melakukan jalur sengketa jurnalistik dengan memberikan hak jawab atau hak koreksi kepada pihak penerbit. Untuk menciptakan hal yang tertib dalam menjalani proses hukum dan menghindari hal yang sifatnya sepihak atau "main hakim sendiri." Seperti yang tertulis pada paragraf 4

"Nawawi menilai, jika ada pihak atau kelompok yang merasa keberatan atau dirugikan dengan sebuah karya jurnalistik, yang bersangkutan seharusnya menempuh jalur sengketa jurnalistik, yaitu dengan memberikan hak jawab atau hak koreksi. Pihak yang dirugikan itu juga bisa mengadukan media atau karya jurnalistik tersebut kepada Dewan Pers. "Karena Dewan Pers-lah yang berhak menilai dan memiliki kewenangan menilai, apakah sebuah karya jurnalistik tersebut telah melanggar kode etik jurnalistik atau tidak," ucapnya "

Tabel 3.1.1 Analisis Berita 1

Element	Tempo.co
Define Problem	Demo atas kasus karikatur Habib Rizieq Shihab
Diagnose Causes	Karikatur yang di terbitkan Tempo merupakan sebuah karya Jurnalistik, menurut LBH
Moral Evaluation	Bahwa demonstrasi yang memicu aksi unjuk rasa
ISL	merupakan hal yang tidak di benarkan dalam peraturan kehidupan ber demokrasi
Treathment	Kedua belah pihak di tuntut untuk melalui jalur
Recommendation	hukum agar tidak terjadi hal yang diluar perkiraan

### b) Berita : 2

Tanggal :: Sabtu, 17 Maret 2018 11:01 WIB

Judul : Karikatur Tempo, AJI Jakarta: Aksi Massa FPI Tak Paham UU Pers

"Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta menyatakan demo memprotes karikatur Tempo oleh massa Front Pembela Islam (FPI) di Gedung Tempo di Jalan Palmerah 8 Jakarta Selatan, Jumat 16 Maret 2018 sebagai aksi yang tidak memahami Undang-Undang Pers. Sebab, pengerahan massa untuk memaksa media mengakui kesalahan karya jurnalistik adalah sikap yang anti demokrasi dan anti kebebasan pers.

"Yang berhak menghakimi apakah karya jurnalistik itu (termasuk dalam hal ini karikatur Tempo) melanggar kode etik atau tidak itu Dewan Pers. Bukan pihak lain," kata Ketua AJI Jakarta Ahmad Nurhasim dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat, 16 Maret 2017.

Sebanyak 200 massa FPI mendatangi Gedung Tempo pada Jumat siang, 16 Maret 2018. Mereka menganggap karikatur yang dimuat Majalah Tempo edisi 26 Februari 2018 adalah penghinaan bagi ulama, yakni imam besar FPI, Rizieq Shihab.

Dalam perundingan dengan Tempo disepakati bahwa masalah ini akan diselesaikan lewat Dewan Pers, dan FPI dipersilakan memberikan tanggapan atau hak jawab terkait dengan karikatur itu. Mekanisme ini sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yakni Pasal 15 soal Dewan Pers. Adapula ketentuan di Pasal 5 terkait Asas, Fungsi, Hak, Kewajiban dan Peranan Pers.

Menurut Nurhasim, Tempo sebenarnya telah menjalankan fungsi pers dengan benar sebagai alat kontrol sosial, mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar, serta melakukan pengawasan, kritik, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum. Karena itu, AJI mengecam aksi demo yang digelar oleh massa Front Pembela Islam (FPI).

"Seharusnya keberatan massa FPI terhadap karikatur yang dimuat Majalah Tempo edisi 26 Februari 2018 itu disampaikan melalui hak jawab, hak koreksi, atau pengaduan ke Dewan Pers," kata Nurhasim.

Menurut Nurhasim lagi, aksi memprotes karikatur Tempo tersebut bisa menciptakan efek ketakutan di kalangan jurnalis dan media untuk bersikap kritis dan independen. Sebab, bukan tidak mungkin media lain juga akan didemo lain waktu ketika memproduksi karya jurnalistik yang kritis terhadap sebuah kelompok masyarakat."

(https://metro.tempo.co/read/1070540/karikatur-tempo-aji-jakarta-aksi-massa-fpi-tak-paham-uu-pers, diakses tanggal 14 Juni 2019)

Define Problem. Aksi massa FPI yang berdemonstrasi di kantor Redaksi Tempo pada tanggal 16 Maret itu tidak memahami unsur yang yang berurusan dengan Undang Undang Pers. Aksi demonstrasi massa tersebut mendesak redaksi Tempo untuk mengakui kesalahan yang telah menerbitkan karikatur Habib Rizieq Shihab karena menurut massa anggota FPI itu melakukan penghinaa terhadap ulama, yakni imam besar FPI, Habib Rizieq Shihab seperti yang tertulis dalam berita pada paragraf 1.

"Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta menyatakan demo memprotes karikatur\_Tempo oleh massa Front Pembela Islam (FPI) di Gedung Tempo di Jalan Palmerah 8 Jakarta Selatan, Jumat 16 Maret 2018 sebagai aksi yang tidak memahami Undang-Undang Pers. Sebab, pengerahan massa untuk memaksa media mengakui kesalahan karya jurnalistik adalah sikap yang anti demokrasi dan anti kebebasan pers."

Diagnoses Cause. Sebetulnya kasus tersebut dapat memicu para Jurnalis menjadi takut untuk membuat sebuah karya, karena di kasus ini karikatur yang telah di terbitkan oleh pihak Tempo sudah memicu kemarahan kepada sebagian orang, yang sekaligus menjadi sebuah ke waspadaan pihak redaksi untuk menciptakan media yang kritis. Bukan hanya redaksi Tempo saja yang menjadi takut karena kasus ini, media lain juga akan merasakan hal yang sama dirasakan redaksi Tempo untuk tetap waspada terhadap konten atas kritik terhadap para tokoh yang pendukungnya mengarah kepada fanatisme. Seperti yang tertulis di paragraf 6.

"Menurut Nurhasim lagi, aksi memprotes karikatur Tempo tersebut bisa menciptakan efek ketakutan di kalangan jurnalis dan media untuk bersikap kritis dan independen. Sebab, bukan tidak mungkin media lain juga akan didemo lain waktu ketika memproduksi karya jurnalistik yang kritis terhadap sebuah kelompok masyarakat."

*Moral Judgment*. Dan dalam kasus ini Tempo tidak melakukan sebuah kesalahan dalam kritik yang di terbitkan pada sebuah karya karikatur yang menjadikan Habib Rizieq Shihab sebagai tokoh tunggal dalam karya karikatur tersebut. Seperti yang tertulis di dalam berita pada paragraf 4.

"Menurut Nurhasim, Tempo sebenarnya telah menjalankan fungsi pers dengan benar sebagai alat kontrol sosial, mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar, serta melakukan pengawasan, kritik, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum. Karena itu, AJI mengecam aksi demo yang digelar oleh massa Front Pembela Islam (FPI)."

*Treatment Reccomendations*. Dalam kasus ini sebetulnya jalan yang harus di tempuh kedua belah pihak adalah melalui perundingan yang melibatkan dewan pers karena masalah yang berkaitan dengan sebuah karya jurnalistik harus di selesaikan dengan

terlibatnya dewan pers yang memiliki posisi sebagai pengawas sekaligus penanggung jawab dalam dunia pemberitaan. Seperti yang tertulis di dalam berita pada paragraf 3.

"Dalam perundingan dengan Tempo disepakati bahwa masalah ini akan diselesaikan lewat Dewan Pers, dan FPI dipersilakan memberikan tanggapan atau hak jawab terkait dengan karikatur itu. Mekanisme ini sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yakni Pasal 15 soal Dewan Pers. Adapula ketentuan di Pasal 5 terkait Asas, Fungsi, Hak, Kewajiban dan Peranan Pers."

Tabel 3.1.1 Analisis berita 2

Element	Tempo.co
Define Problem	aksi yang tidak memahami Undang-Undang Pers.
lin A	Sebab, pengerahan massa untuk memaksa media
I V	mengakui kesalahan karya jurnalistik adalah
	sikap yang anti demokrasi dan anti kebebasan
1111	pers
Diagnoses Cause	aksi memprotes karikatur Tempo tersebut bisa
	menciptakan efek ketakutan di kalangan jurnalis
Moral Judgement	Redaksi Tempo sudah melakukan hal yang benar
14 1	dalam artian sudah melakukan dan berfungsi
15 /	sebagai alat kontrol sosial, mengembangkan
	pendapat umum berdasarkan informasi yang
	tepat, akurat, dan benar
Treatment Reccomendations	Jalan yang harus di tempuh kedua belah pihak
A CONTRACTOR	adalah melalui perundingan yang melibatkan
	dewan pers karena masalah yang berkaitan
	dengan sebuah karya jurnalistik harus di
	selesaikan dengan terlibatnya dewan pers

c) Berita : 3

Tanggal : Sabtu, 17 Maret 2018 13:42 WIB

Judul : Setara Institute Kecam Aksi Massa FPI Saat Protes Karikatur Tempo

"SETARA Institute mengecam aksi demonstrasi yang dilakukan oleh massa Front Pembela Islam (FPI) yang memprotes karikatur Tempo, pada Jumat 16 Maret 2018 di Gedung Tempo.

Wakil Ketua SETARA Institute, Bonar Tigor Naipospos mengatakan demo tersebut nyata-nyata merupakan intimidasi atas pers sebagai pilar keempat demokrasi.

"Mobilisasi kerumunan massa (mob) secara fisik karena karya dan produk jurnalistik yang dimuat oleh media massa pada dasarnya adalah serangan fisik dan psikis atas media sebagai lembaga pengawal keadaban publik dalam demokrasi," kata Bonar dalam keterangan tertulisnya di Jakarta pada Sabtu, 17 Maret

Pada Jumat siang 16 Maret 2018, dua ratusan anggota FPI melakukan aksi demo untuk meminta redaksi Majalah Tempo meminta maaf atas publikasi karikatur yang dinilai menghina atau melecehkan umat Islam khusunya Imam Besar FPI, Rizieq Shihab.

Aksi yang semula damai menjadi ricuh dan diwarnai dengan kekerasan verbal, gebrakan meja, pelemparan gelas air mineral, dan perampasan paksa kaca mata Pemimpin Redaksi Majalah TEMPO oleh pengunjuk rasa.

Menurut Bonar, kekecewaan suatu kelompok terhadap terhadap produk dan karya jurnalistik dibenarkan dalam alam demokrasi. Namun, menurut dia, saluran yang tepat untuk mempersoalkannya adalah melalui Dewan Pers bukan lewat demo atau unjuk rasa.

"Maka apabila terdapat lembaga pers yang memproduksi dan memuat karya jurnalistik yang dinilai tidak sesuai dengan kaidah-kaidah jurnalistik dan melanggar kode etik, saluran yang tepat untuk mempersoalkannya adalah melalui Dewan Pers," kata Bonar.

Mekanisme mempersoalkan lembaga pers melalui Dewan Pers merupakan salah satu aspek tata kelola demokratis yang disediakan oleh negara untuk menjamin terwujudnya tertib sosial dan keadaban publik. Sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, yakni Pasal 15 yang berisi mengenai Dewan Pers.

Selain itu, Bonar juga menyoroti demonstran yang sempat menunjukkan para demonstran melakukan aksi paksa terhadap Pemimpin Redaksi Majalah Tempo, Arif Zulkifli, dengan cara merampas paksa kaca mata yang bersangkutan saat memberikan penjelasan di atas mobil komando FPI dan melemparkannya ke tengah kerumunan massa. Menurut Bonar, hal itu merupakan kebiadaban yang seharusnya dicegah oleh pihak kepolisian.

Aparat kepolisian sebagai representasi negara tidak boleh melakukan pembiaran terhadap intimidasi dan paksaan fisik yang terjadi. "Pembiaran demikian dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia," demikian Bonar tentang aksi dalam demonstrasi soal karikatur Tempo tersebut."

(https://metro.tempo.co/read/1070578/setara-institute-kecam-aksi-massa-fpi-saat-protes-karikatur-tempo, diakses tanggal 14 Juni 2019)

Define Problem. Demo yang terjadi di depan kator redaksi Tempo merupakan hal yang dinilai tidak menjalankan asas kebebasan dalam berdemokrasi, yakni dalam hal ini, berita yang mengandung nilai kritis merupakan satu dari sekian banyaknya contoh kehidupan berdemokrasi di negara ini. Wakil Setara Institute, Bonar Tigor Naipospos menyatakan bahwa demonstrasi ini merupakan sebuah intimidasi atas pers. Dan pada hari itu juga massa demontrasi dari FPI menyuruh kepada redaksi Tempo untuk segera meminta maaf atas tindakan yang membuat karikatur dengan tokoh Habib Rizieq Shihab yang di anggap melecehkan para umat Islam, yakni imam besar Habib Rizieq Shihab seperti yang tertulis dalam berita pada paragraf 2 dan 4.

"Wakil Ketua SETARA Institute, Bonar Tigor Naipospos mengatakan demo tersebut nyata-nyata merupakan intimidasi atas pers sebagai pilar keempat demokrasi."

"Pada Jumat siang 16 Maret 2018, dua ratusan anggota FPI melakukan aksi demo untuk meminta redaksi Majalah Tempo meminta maaf atas publikasi karikatur yang dinilai menghina atau melecehkan umat Islam khusunya Imam Besar FPI, Rizieg Shihab."

*Diagnoses Cause.* Menurut Bonar Tigor Naipospos, dalam kasus ini, massa demo FPI di benarkan untuk memprotes atas terbitnya karikatur bergambar Habib Rizieq Shihab tersebut. Namun yang di temukan bukanlah sebuah jalan damai untuk di tempuhnya melainkan dengan melakukan demonstrasi yang menimbulkan kemarahan pendemo sehingga dapat memicu terjadinya unjuk rasa yang menimbulkan kerugian di kedua belah pihak. Seperti yang tertulis pada berita di paragraf 6.

"Menurut Bonar, kekecewaan suatu kelompok terhadap terhadap produk dan karya jurnalistik dibenarkan dalam alam demokrasi. Namun, menurut dia, saluran yang tepat untuk mempersoalkannya adalah melalui Dewan Pers bukan lewat demo atau unjuk rasa."

*Moral Judgment*. Untuk semua pelanggaran Lembaga pers yang di temukan oleh siapapun, tetaplah mengacu kepada dewan pers. Karena bukan sebuah kemungkinan, dewan pers juga akan melakukan koreksi kepada sebuah Lembaga pers yang mengacu pada kesalahan. Sehingga bagaimanapun juga, yang berhak untuk menghakimi salah atau benarnya sebuah Lembaga pers adalah dewan pers yang memegang peran dan fungsi sebagai penanggung jawab maupun pengawas Lembaga pers yang ada, tanpa terkecuali. Seperti yang tertulis dalam berita pada paragraf 8.

"Mekanisme mempersoalkan lembaga pers melalui Dewan Pers merupakan salah satu aspek tata kelola demokratis yang disediakan oleh negara untuk menjamin terwujudnya tertib sosial dan keadaban publik. Sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, yakni Pasal 15 yang berisi mengenai Dewan Pers."

*Treatment Recomendations.* Di dalam berita ini tidak terdapat treatment recommendations.

Tabel 3.1.1 Analisis berita 3

Elements	Tempo.co
Define Problem	Demo tersebut nyata-nyata merupakan intimidasi
121	atas pers
Diagnoses Cause	Saluran yang tepat untuk mempersoalkannya
107	adalah melalui Dewan Pers bukan lewat demo atau
	unjuk rasa
Moral Judgement	Mekanisme mempersoalkan lembaga pers melalui
	Dewan Pers merupakan salah satu aspek tata kelola
10 4	demokratis yang disediakan oleh negara untuk
141	menjamin terwujudnya tertib sosial dan keadaban
	publik
Treatment recommendations	

# d) Berita : 4

Tanggal : Rabu, 21 Maret 2018 14:53 WIB

Judul : Soal Demo Karikatur Tempo, LBH Masyarakat: Demokrasi Belum Utuh

"Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat menilai unjuk rasa yang dilakukan Front Pembela Islam (FPI) terhadap Tempo menunjukkan bahwa nilai demokrasi belum sepenuhnya menjadi bagian dalam masyarakat.

"Buat saya, apa yang terjadi di Tempo beberapa waktu lalu itu menunjukan betapa belum integralnya nilai demokrasi dalam masyarakat kita," kata analis Hak Asasi Manusia dari LBH Masyarakat, Yohan Misero, dalam pesan singkatnya kepada Tempo pada Selasa, 20 Maret 2018.

Dalam aksi demonstrasi yang dilakukan pada Jumat, 16 Maret 2018, FPI memprotes pemuatan karikatur yang mereka persepsikan sebagai Rizieq Shihab di

Majalah Tempo. FPI menuntut permohonan maaf dari Tempo karena dinilai telah menghina Rizieq.

Saat diterima untuk bermediasi, seorang anggota FPI menggebrak meja dan melempar gelas air mineral ke tengah meja diskusi. Intimidasi berlanjut saat Pemimpin Redaksi majalah Tempo, Arif Zulkifli, dituntut keluar untuk meminta maaf di depan massa FPI. Saat Arif memberikan penjelasan di atas mobil, seorang yang diduga anggota FPI merebut dan melempar kacamata Arif ke tengah kerumunan massa. Sementara itu, anggota FPI yang berada di bawah mobil komando juga melempari Arif dengan gelas air mineral.

Menurut Yohan, sebuah karikatur semestinya lebih dihargai. "Karena di tengah terbitnya regulasi yang memberangus kebebasan berpendapat, seperti UU MD3 dan RKUHP, karikatur bisa jadi media yang lebih fleksibel untuk menuturkan keresahan," kata Yohan.

Di momen-momen politik untuk dua tahun ke depan, kata Yohan, Indonesia membutuhkan lebih banyak kritik dan satir agar masyarakat tidak tenggelam dalam pengidolaan yang berlebihan. "Dan tetap waras dalam berbangsa," ujarnya.

Yohan berharap, aksi yang dilakukan FPI tidak melemahkan Tempo. Tetapi semakin meneguhkan kerja-kerja Tempo untuk demokrasi."

(https://nasional.tempo.co/read/1071802/soal-demo-karikatur-tempo-lbh-masyarakat-demokrasi-belum-utuh, diakses tanggal 14 Juni 2019)

Define Problem. Di zaman sekarang ini, masyarakat Indonesia banyak yang menganggap setiap kesalahan harus di serang dengan kekuatan sedemikian rupa. Namun di balik itu juga masyarakat juga harus menganut asa demokrasi, yang setiap warga negara berhak berpendapat atas apa yang dia ketahui, sekalipun masyarakat biasa. Di dalam kasus ini terlihat sekali aksi "arogan" yang di lakukan oleh pihak FPI kepada pihak redaksi Tempo pada hari jumat tanggal 16 maret 2018 tersebut dengan

dalih pihak redaksi Tempo harus mengakui kesalahan atas pemuatan karikatur imam besar FPI, yakni Habib Rizieq Shihab yang diyakini sudah melecehkan umat Islam, khususnya para ulama. Seperti yang di tulis dalam berita paragraf 1 dan 2.

"Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat menilai unjuk rasa yang dilakukan Front Pembela Islam (FPI) terhadap redaksi yang menunjukkan bahwa nilai demokrasi belum sepenuhnya menjadi bagian dalam masyarakat."

"Buat saya, apa yang terjadi di Tempo beberapa waktu lalu itu menunjukan betapa belum integralnya nilai demokrasi dalam masyarakat kita,"

*Diagnoses Cause.* Kasus tersebut seharusnya di selesaikan dengan penuh kepala dingin, karena yang berhak menentukan salah atau tidak bersalahnya adalah dewan pers itu sendiri disertai dengan adanya mediasi antara kedua belah pihak untuk menyampaikan hak jawab sekaligus hak koreksi atas kesalahan. Seperti yang tertulis dalam berita paragraf 3.

"Saat diterima untuk bermediasi, seorang anggota FPI menggebrak meja dan melempar gelas air mineral ke tengah meja diskusi. Intimidasi berlanjut saat Pemimpin Redaksi majalah Tempo, Arif Zulkifli, dituntut keluar untuk meminta maaf di depan massa FPI. Saat Arif memberikan penjelasan di atas mobil, seorang yang diduga anggota FPI merebut dan melempar kacamata Arif ke tengah kerumunan massa. Sementara itu, anggota FPI yang berada di bawah mobil komando juga melempari Arif dengan gelas air mineral."

*Moral Judgment*. Di tahun politik ini akan lebih bainya pihak redaksi menjadikan pembaca untuk lebih mengerti apa itu demokrasi yang bersifat mengkritik kepada para tokoh yang ada dengan tidak melakukan kesalahan dalam penyampaian informasi. Dan terlebih informasi yang disampaikan haruslah mengacu pada focus pemberitaan supaya tidak ada sebuah kelompok fanatisme kepada seorang tokoh dan tetap mampu mengritisi siapa saja yang seharusnya di kritik saat itu juga. Seperti yang tertulis pada berita paragraf 5.

"Di momen-momen politik untuk dua tahun ke depan, kata Yohan, Indonesia membutuhkan lebih banyak kritik dan satir agar masyarakat tidak tenggelam dalam pengidolaan yang berlebihan. "Dan tetap waras dalam berbangsa," ujarnya."

Treatment Recommendations. Dengan terbitnya UU MD3, para kritikus bangsa mulai dibikin "wanti wanti" atas apa yang akan dan sudah di tulisnya tentang kritikan untuk para tokoh. Bahkan dengan terbitnya UU MD3 tersebut masih juga banyak kontroversi atas munculnya istilah pemerintah anti kritik yang banyak di sematkan oleh para warga negara atas beredarnya informasi UU MD3 tersebut. Bahkan dari sisi jurnalis pun juga merasa perlu berhati hati atas kritik yang mendalam kepada sebuah tokoh jajaran petahana baik yang berbentuk langsung ataupun dengan sindiran. Seperti yang tertulis dalam berita paragraf 4.

"Menurut Yohan, sebuah karikatur semestinya lebih dihargai. "Karena di tengah terbitnya regulasi yang memberangus kebebasan berpendapat, seperti UU MD3 dan RKUHP, karikatur bisa jadi media yang lebih fleksibel untuk menuturkan keresahan," kata Yohan."

Tabel 3.1.1 Analisis berita 4

Elements	Тетро.со
Define Problem	nilai demokrasi belum sepenuhnya menjadi bagian
17	dalam masyarakat.
Diagnoses Cause	Arogansi massa dari FPI yang melakukan tindakan
	tidak terpuji
Moral Judgment	Indonesia membutuhkan lebih banyak kritik dan satir
18 Jan 19 19 18	agar masyarakat tidak tenggelam dalam pengidolaan
الالعات	yang berlebihan
Treatment Recommendation	sebuāh karikatur semestinya lebih dihargai

e) Berita : 5

Tanggal: Minggu, 18 Maret 2018 14:14 WIB

Judul : FPI Demo Tempo, Pakar Hukum: Perampasan Kacamata Tindakan

Pidana

"Pakar hukum pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar mengatakan kekerasan yang dilakukan Front Pembela Islam (FPI) saat aksi damai memprotes karikatur Tempo di Gedung Tempo, Palmerah Barat, Kebayoran Lama, termasuk tindakan pidana.

Perampasan kacamata Pemimpin Redaksi Majalah Tempo Arif Zulkifli adalah tindak pidana delik umum. "Meski begitu tetap harus dilaporkan oleh saksi yang melihat, mendengar bahkan merasakannya sendiri" kata Fickar saat dihubungi Tempo Ahad, 18 Maret 2018.

Menurut Abdul Fickar Hadjar unjuk rasa merupakan bagian dari demokrasi yang menjadi hak setiap orang maupun kelompok. FPI juga mempunyai hak untuk melaksanakannya. "Dalam melakukan demo tentu saja ada koridor-koridor yang tidak bisa dilanggar," kata Fickar.

Sekitar 200 anggota FPI menggelar unjuk rasa di kantor Tempo pada Jumat lalu. Mereka meminta redaksi meminta maaf atas publikasi karikatur di majalah Tempo yang dinilai telah menghina dan merendahkan pemimpin mereka, Rizieq Shihab. Aksi ini diwarnai kekerasan verbal, gebrakan meja, pelemparan gelas air mineral, hingga perampasan kaca mata pemimpin redaksi Majalah Tempo.

FPI menafsirkan orang berjubah dalam kartun tersebut adalah Rizieq Shihab, imam besar FPI yang kini bermukim di Arab Saudi. Mereka menganggap pemuatan kartun ini sebagai bentuk pelecehan kepada ulama dan umat Islam.

Lebih jauh Abdul Fickar menjelaskan bahwa hukum yang mengatur bukan hanya terbatas pada aturan mengenai demonstrasi. Jika peserta unjuk rasa melakukan hal yang melanggar hukum pidana maka pelaku harus diproses secara pidana.

"Tidak terkecuali juga tindakan yang merampas kacamata Pemred Majalah Tempo Arif Zulkifli serta pengancaman apalagi menimbulkan kerusakan pada barang. Maka tindakan-tindakan ini dapat dikualifisir sebagai tindak pidana ancaman, kekerasan terhadap benda kacamata dan benda lain jika ada dan kekerasan terhadap orang," Abdul Fickar menegaskan.

Sebelumnya, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyesalkan unjuk rasa yang digelar FPI di kantor Tempo. Aksi pengerahan massa ini terkesan main hakim sendiri dan cenderung mengarah pada tindakan persekusi.

"FPI seharusnya menghormati hukum dan mengedepankan dialog yang saling menghargai," kata Kordinator Nasional KontraS Yati Andriyani, Sabtu, 17 Maret 2018.

Yati menilai, aksi yang digelar FPI yang memprotes kartun Tempo itu sudah menjurus ke arah intimidasi. Sebab selama proses dialog antara perwakilan pengunjuk rasa dan jajaran redaksi Tempo, terjadi pelemparan gelas air mineral, teriakan, dan pemaksaan terhadap Pemimpin Redaksi Majalah Tempo Arif Zulkifli untuk menyatakan permintaan maaf."

(https://metro.tempo.co/read/1070793/fpi-demo-tempo-pakar-hukum-perampasan-kacamata-tindakan-pidana, diakses 14 Juni 2019)

Define Problem. Pakar hukum Universitas Trisakti mengatakan bahwa protes atas karya Jurnalistik tersebut hingga melakukan perampasan kacamata Arif Zulkifli merupakan tindakan pidana. Demonstrasi merupakan sebuah hak setiap masyarakat, namun ada juga tata cara untuk melakukan demonstrasi dengan tidak melakukan intimidasi atau sampai melakukan kerusakan di lokasi, bahkan tidak sampai melakukan penganiayaan terhadap pihak lawan. Seperti yang tertulis pada berita di paragraf 2.

"Perampasan kacamata Pemimpin Redaksi Majalah Tempo, Arif Zulkifli adalah tindak pidana delik umum. "Meski begitu tetap harus dilaporkan oleh saksi yang melihat, mendengar bahkan merasakannya sendiri" kata Fickar saat dihubungi Tempo Ahad, 18 Maret 2018. Menurut Abdul Fickar Hadjar unjuk rasa merupakan bagian dari demokrasi yang menjadi hak setiap orang maupun kelompok. FPI juga

mempunyai hak untuk melaksanakannya. "Dalam melakukan demo tentu saja ada koridor-koridor yang tidak bisa dilanggar," kata Fickar."

*Diagnoses Cause.* Menurut Abdul Fickar Hadjar, tindakan protes atau demonstrasi merupakan hak yang dimiliki oleh semua warga masyarakat. Namun tidak dengan melakukan perbuatan yang tidak di perkenankan dan bisa di masukan dalam kasus pidana. Seperti yang tertulis pada berita di paragraf 5.

"Abdul Fickar menjelaskan bahwa hukum yang mengatur bukan hanya terbatas pada aturan mengenai demonstrasi. Jika peserta unjuk rasa melakukan hal yang melanggar hukum pidana maka pelaku harus diproses secara pidana."

*Moral Judgment.* Di dalam kasus ini seharusnya FPI untuk tetap melakukan aksi damai yang di lantunkan oleh para pendemo akan menjalankan aksi damai yang menjurus pada pihak redaksi untuk meminta maaf kepada umat Islam karena telah menerbitkan karikatur Habib Rizieq Shihab di dalam majalah. Seperti yang tertulis pada berita di paragraf 8.

"FPI seharusnya menghormati hukum dan mengedepankan dialog yang saling menghargai,"

Treatment Recommendations. Di dalam berita ini tidak terdapat treatment recommendations.

Tabel 3.1.1 Analisis Berita 5

Elements	Tempo.co
Define Problem	Perampasan kacamata Pemimpin Redaksi
	Majalah Tempo, Arif Zulkifli adalah tindak
	pidana delik umum
Diagnoses Cause	Jika peserta unjuk rasa melakukan hal yang
	melanggar hukum pidana maka pelaku harus
	diproses secara pidana

Moral Judgment	FPI seharusnya menghormati hukum dan
	mengedepankan dialog yang saling
	menghargai
Treatment Recommendation	-

f) Berita : 6

Tanggal : Rabu, 21 Maret 2018 16:28 WIB

Judul : Koalisi Masyarakat Sipil Minta Jokowi Membela Kebebasan Pers

"Koalisi Masyarakat Sipil menilai aksi FPI di depan kantor Tempo terkait kartun pria bersorban sebagai persekusi atau intimidasi. Para aktivis dari LBH Pers, YLBHI, Kontras, AJI Indonesia, dan Safenet itu meminta Presiden Jokowi membela kebebasan pers.

"Menuntut kepada Presiden Jokowi untuk bersikap tegas untuk membela kebebasan pers dan kebebasan berekspresi sebagai wujud keberpihakan pada demokrasi dan HAM," Koordinator Safenet Damar Juniarto di Kantor LBH Pers, Jalan Kalibata Timur IV G No 10, Pancoran, Jakarta Selatan, Selasa (21/3/2018).

Menurut Direktur Eksekutif LBH Pers Nawawi Bahrudin, yang dilakukan Tempo adalah karya jurnalistik yang dilindungi undang-undang dan konstitusi, khususnya UU No 40/1999 tentang Pers dan Pasal 28F UUD 1946 dan sesuai dengan fungsi pers.

"Bahwa pers adalah lembaga kontrol yang menjunjung tinggi nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum dan HAM serta menghormati kebhinekaan," ujarnya.

Nawawi mengatakan jika ada kelompok yang keberatan atau dirugikan dengan karya jurnalistik, seharusnya mengadu ke Dewan Pers. Dewan Pers lah yang berhak menilai apakah karya jurnalistik itu melanggar kode etik jurnalistik atau tidak.

"Meskipun demokrasi adalah HAM dan dijamin konstitusi dan UU, namun dengan niat akan menduduki atau orasi mengandung hate speech dan memaksa untuk mengakui kesalahan, intervensi ruang redaksi dan bentuk intimidasi lainya adalah hal yang tidak dibenarkan oleh hukum. Jika itu terjadi aparat penegak hukum sepatutnya melindungi pers," ucapnya. Selain itu, Ketua Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI) Abdul Manan aksi FPI di kantor Tempo merupakan bagian dari intimidasi. Keberatan soal pemberitaan harus diselesaikan lewat sengketa pers.

"Kami mengingatkan bahaya ini agar ini tidak menjadi model dan ditiru ormasormas lain. Sebagai organisasi wartawan kita mendesak publik untuk menggunkan pendekatan yang ada di UU untuk menyelesaikan sengketa media," ujar Manan.

Massa Laskar Pembela Islam (LPI) dan Front Pembela Islam (FPI) aksi di depan kantor Tempo, Jumat (16/3). Mereka protes berkaitan dengan karikatur ulama yang menjadi cover majalah Tempo edisi 26 Februari 2018.

"Yang pasti Tempo telah menghina ulama makanya kami menuntut Tempo minta maaf kepada umat Islam dan ulama. Makanya, kami akan minta klarifikasi atas karikatur itu," kata Humas Persaudaran Alumni 212 yang juga anggota FPI, Novel Bamukmin.

Menurut Novel, karikatur tersebut menggambarkan seorang ulama berpakaian gamis dan bersorban. Di depan sosok ulama itu terdapat seorang perempuan yang dianggap menggunakan pakaian yang tidak sopan."

(https://news.detik.com/berita/d-3928955/koalisi-masyarakat-sipil-minta-jokowi-bela-kebebasan-pers, diakses 14 Juni 2019)

Define Problem. Koalisi yang terdiri dari LBH Pers, YLBHI, Kontras, AJI Indonesia, dan Safenet untuk menunjukan sikap kepada public mengenai kasus demonstrasi di kantor Tempo yang di pandang sebagai aksi intimidasi kepada para jurnalis untuk menciptakan sebuah karya jurnalistik dan sekaligus meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk membela hak Pers untuk tetap menciptakan sebuah kemerdekaan bagi Pers. Seperti yang tertulis pada berita paragraf 1.

"Koalisi Masyarakat Sipil menilai aksi FPI di depan kantor redaksi Tempo terkait kartun pria bersorban sebagai persekusi atau intimidasi. Para aktivis dari LBH Pers, YLBHI, Kontras, AJI Indonesia, dan Safenet itu meminta Presiden Jokowi membela kebebasan pers."

Diagnose Cause. Koalisi LBH Pers, YLBHI, Kontras, AJI Indonesia, dan Safenet menuntut kepada Presiden untuk bersikap tegas mendukung kebebasan Pers untuk mewujudkan demokrasi berpihak kepada demokrasi dan HAM. Kasus tersebut dinilai tidak mewujudkan nilai kebebasan dalam Pers dengan mengintimidasi pihak Pers sebagai sebuah kesalahan yang di ciptakan, walaupun seharusnya dewan Pers yang mampu menentukan salah atau benarnya sebuah karya jurnalistik. Seperti yang tertulis pada berita di paragraf 2.

"Menuntut kepada Presiden Jokowi untuk bersikap tegas untuk membela kebebasan pers dan kebebasan berekspresi sebagai wujud keberpihakan pada demokrasi dan HAM," Koordinator Safenet Damar Juniarto di Kantor LBH Pers, Jalan Kalibata Timur IV G No 10, Pancoran, Jakarta Selatan, Selasa (21/3/2018)."

Moral Judgment. Di dalam berita ini tidak terdapat moral judgment.

Treatment recommendations. Menurut Nawawi bahrudin, bahwa setiap kesalahan yang diketahui oleh penerima informasi dalam karya Jurnalistik di harapkan untuk melaporkan atau mengadu kepada dewan Pers. Karena dewan Pers yang berhak menentukan benar atau salah atas karya Jurnalistik yang telah diciptakan. Seperti yang tertulis pada berita di paragraf 4.

"Nawawi mengatakan jika ada kelompok yang keberatan atau dirugikan dengan karya jurnalistik, seharusnya mengadu ke Dewan Pers. Dewan Pers lah yang berhak menilai apakah karya jurnalistik itu melanggar kode etik jurnalistik atau tidak."

Tabel 3.1.1 Analisis berita 6

Elements	Detik.com
Define Problem	Para aktivis dari LBH Pers, YLBHI, Kontras,
	AJI Indonesia, dan Safenet itu meminta
	Presiden Jokowi membela kebebasan pers

Diagnose Cause	Menuntut kepada Presiden Jokowi untuk
	bersikap tegas untuk membela kebebasan pers
	dan kebebasan berekspresi sebagai wujud
	keberpihakan pada demokrasi dan HAM
Moral Judgment	-
Treatment Recommendations	Jika ada kelompok yang keberatan atau
ISL	dirugikan dengan karya jurnalistik, seharusnya
//	mengadu ke Dewan Pers

# 2. Kategorisasi "Aksi Protes, Pengamanan, Mediasi"

a) Berita :1

Tanggal : Jumat 16 Maret 2018; 14:34 WIB

Judul : Tiba di Kantor Tempo, Massa FPI Orasi Protes karikatur 'Pria Bersorban'

"Massa Front Pembela Islam (FPI) mendatangi kantor Majalah Tempo untuk memprotes karikatur yang dimuat majalah tersebut. Massa aksi menganggap karikatur itu menghina Imam Besar FPI Habib Rizieq Shihab.

Pantauan detikcom, Jumat (16/3), ratusan massa aksi datang sekitar pukul 14.00 WIB di kantor media Tempo, di Jalan Palmerah Barat, Jakarta Selatan. Mereka pun membawa mobil komando dengan pengeras suara.

Di atas mobil komando, orator aksi menuntut Tempo untuk minta maaf. Dengan begitu mereka bisa segera membubarkan diri. "Tempo harus minta maaf karena karikatur yang melecehkan ulama dan cucu Nabi Muhammad SAW," ucap orator tersebut. Massa aksi pun berjanji aksi mereka damai. Orator memperingatkan massa agar tidak terprovokasi. "Jika ada provokator, kita amankan, kita naikkan ke mobil komando," katanya. Polisi pun telah menyiapkan penjagaan. Mereka berjalan di depan pintu kantor Majalah Tempo. Pemred Majalah Tempo Arif Zulkifli terbuka untuk berdialog dengan FPI. "Tempo akan menerima utusan FPI datang," ujar Arif ketika dikonfirmasi, Jumat (16/3/2018). yang

Selain siap menerima utusan FPI, kata Arif, Tempo juga membuka diri untuk diskusi. "Kami terbuka terhadap dialog, termasuk untuk mendiskusikan hasil kerja jurnalistik yang kami lakukan," ujar pria yang akrab disapa Azul ini."

(https://news.detik.com/berita/d-3920124/tiba-di-kantor-tempo-massa-fpi-orasi-protes-karikatur-pria-bersorban, diakses 14 Juni 2019)

Define Problem. Massa mendatangi kantor redaksi Tempo yang bertujuan untuk klarifikasi sekaligus mendapati permohonan maaf dari pihak redaksi karena telah menerbitkan karikatur yang melecehkan umat islam, khususnya para ulama, yakni imam besar Rizieq Shihab yang berjumlah ratusan dan membawa mobil komando sebagai alat untuk orasi. Seperti yang tertulis pada paragraf 1 dan 2.

"Massa Front Pembela Islam (FPI) mendatangi kantor Majalah Tempo untuk memprotes karikatur yang dimuat majalah tersebut. Massa aksi menganggap karikatur itu menghina Imam Besar FPI Habib Rizieq Shihab."

"Pantauan detikcom, Jumat (16/3), ratusan massa aksi datang sekitar pukul 14.00 WIB di kantor media Tempo, di Jalan Palmerah Barat, Jakarta Selatan. Mereka pun membawa mobil komando dengan pengeras suara."

Diagnose Cause. Massa FPI menuntut untuk pihak redaksi Tempo untuk sesegera mungkin melakukan permintaan maaf di depan ratusan para pendemo karena sudah melecehkan cucu Nabi Muhammad S.A.W, dan agar sesegera mungkin massa untuk bisa membubarkan diri dan membuat wilayah di sekitar kantor menjadi kondusif kembali. Orator mengucapkan beberapa kata yg bertumpu pada inti, massa pendemo menjanjikan untuk melakukan aksi damai. Seperti yang tertulis pada berita di paragraf 3.

"Di atas mobil komando, orator aksi menuntut Tempo untuk minta maaf. Dengan begitu mereka bisa segera membubarkan diri. "Tempo harus minta maaf karena karikatur yang melecehkan ulama dan cucu Nabi Muhammad SAW," ucap orator tersebut. Massa aksi pun berjanji aksi mereka damai. Orator memperingatkan massa agar tidak terprovokasi."

*Moral Judgement*. Pihak redaksi Tempo sudah sangat siap untuk melakukan mediasi dengan pihak pendemo untuk menjelaskan atas apa yang sudah di kerjakan pihak redaksi dan sebagai klarifikasi atas kasus yang sedang di hadapi pihak redaksi Tempo. Sepertii yang tertulis pada berita di paragraf 5.

"Selain siap menerima utusan FPI, kata Arif, Tempo juga membuka diri untuk diskusi. "Kami terbuka terhadap dialog, termasuk untuk mendiskusikan hasil kerja jurnalistik yang kami lakukan," ujar pria yang akrab disapa Azul ini."

Treatment Recommendation. Di dalam berita ini tidak terdapat treatment recommendations.

Tabel 3.1.2 Analisis berita 1

Material	Detik.com
Define Problem	Massa Front Pembela Islam (FPI) mendatangi
	kantor Majalah Tempo untuk memprotes
	karikatur yang dimuat majalah tersebut
Diagnoses Cause	Tempo harus minta maaf karena karikatur
	yang melecehkan ulama dan cucu Nabi
14 11	Muhammad SAW
Moral Judgement	Tempo juga membuka diri untuk diskusi.
Treatment Recommendation	•

b) Berita : 2

Tanggal: Jumat, 16 Maret 2018 09:09 WIB

Judul : Polisi Siapkan Pengamanan Demo FPI di Kantor Majalah Tempo

"Massa ormas Front Pembela Indonesia (FPI) hari ini akan melakukan aksi demo di kantor majalah Tempo di Palmerah Barat, Jakarta Selatan. Polda Metro Jaya telah menyiapkan personel untuk mengamankan aksi tersebut.

"Surat pemberitahuannya sudah ada, rencananya siang nanti pukul 13.00 WIB,"

ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Argo Yuwono kepada **detikcom**, Jumat (16/3/2018).

Jumlah peserta aksi diperkirakan mencapai 200 orang. Polda Metro Jaya menyiapkan personel yang cukup untuk mengamankan aksi tersebut.

"Pengamanan tentunya cukuplah, dari Polres setempat di-back up Polda Metro Jaya," imbuhnya.

Selain menyiapkan pengamanan aksi, polisi juga menyiapkan rekayasa pengalihan arus lalu lintas. Pengalihan arus dilakukan secara situasional jika terjadi kepadatan di sekitar lokasi aksi.

"Pengalihan arus situasional," ucapnya. Massa berkumpul mulai pukul 11.00 WIB di Markas FPI Jl Petamburan III, Jakarta Pusat untuk melaksanakan persiapan aksi dan dilanjutkan salat Jumat terlebih dahulu. Selepas salat Jumat, massa bergerak ke kantor redaksi majalah Tempo dengan menggunakan kendaraan pribadi dan motor.

Aksi tersebut digelar sebagai bentuk protes massa FPI atas karikatur yang dimuat majalah Tempo edisi 26 Februari 2018. Karikatur yang dimuat menggambarkan seorang pria memakai gamis dan bersorban sedang duduk berdua dengan seorang perempuan. Di atas pria bersorban tersebut tertulis balon kalimat: "Maaf... Saya tidak jadi pulang." Sedangkan balon kalimat perempuan itu adalah: "Yang kamu lakukan itu jahat." Meski tidak ditulis siapa tokoh dalam karikatur itu, namun massa FPI menilai karikatur itu merendahkan imam besar FPI Habib Rizieq Syihab. Untuk itu, massa FPI akan mendatangi kantor Tempo untuk memprotes. "Tuntutannya meminta Pimpinan Redaksi Majalah Tempo untuk segera meminta maaf kepada umat Islam," tandas Argo."

(https://news.detik.com/berita/d-3919516/polisi-siapkan-pengamanan-demo-fpi-di-kantor-majalah-tempo, diakses 14 Juni 2019)

*Define Problem.* Polda Metro Jaya sudah menyiapkan personel untuk mengamankan aksi demonstrasi dari pihak FPI yang akan menuju kantor redaksi Tempo yang beralamat di Palmerah Barat, Jakarta Selatan. Dan personel yang di kerahkan antara lain dari Polres dan bantuan dari Polda sebagai back up personel yang stay di lokasi kantor redaksi Tempo dari sebelum dimulai hingga berakhirnya aksi demonstrasi tersebut. Seperti yang tertulis pada paragraf 1 dan 2.

"Massa ormas Front Pembela Indonesia (FPI) hari ini akan melakukan aksi demo di kantor majalah Tempo di Palmerah Barat, Jakarta Selatan. Polda Metro Jaya telah menyiapkan personel untuk mengamankan aksi tersebut."

"Polda Metro Jaya menyiapkan personel yang cukup untuk mengamankan aksi tersebut. "Pengamanan tentunya cukuplah, dari Polres setempat di-back up Polda Metro Jaya," imbuhnya."

Diagnose Cause. Rencana demonstrasi sudah diketahui oleh pihak Polda Metro Jaya agar mampu mengamankan jalannya aksi demonstrasi tersebut. Langkah yang diambil pihak kepolisian sudah sangat jelas untuk mencegah hal yang tidak diinginkan oleh kedua belah pihak untuk menyelesaikan dengan cara yang tidak benar. Seperti yang tercantum pada berita pada paragraf 2.

"Surat pemberitahuannya sudah ada, rencananya siang nanti pukul 13.00 WIB," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Argo Yuwono kepada detikcom, Jumat (16/3/2018)."

*Moral Judgement.* Kepolisian terjun ke lokasi bukan hanya untuk mengamankan kedua belah pihak untuk tetap pada prosedur penyelesaian masalah dengan menganut untuk tetap berdamai tanpa kekerasan. Namun kepolisian juga membuat rekayasa arus lalu lintas di sekitar lokasi tersebut untuk menghindari penumpukan kendaraan yang melewati daerah lokasi demonstrasi tersebut. Seperti yang tertulis pada berita di paragraf 3.

"Selain menyiapkan pengamanan aksi, polisi juga menyiapkan rekayasa pengalihan arus lalu lintas. Pengalihan arus dilakukan secara situasional jika terjadi kepadatan di sekitar lokasi aksi. "Pengalihan arus situasional," ucapnya."

*Treatment Recommendations.* Di dalam berita ini tidak terdapat treatment recommendations.

Tabel 3.1.2 Analisis berita 2

Material	Detik.com
Define Problem	Massa ormas Front Pembela Indonesia
	(FPI) hari ini akan melakukan aksi demo di
	kantor majalah Tempo di Palmerah Barat,
	Jakarta Selatan
Diagnoses Cause	Surat pemberitahuannya sudah ada,
	rencananya siang nanti pukul 13.00 WIB
Moral Judgement	polisi juga menyiapkan rekayasa
	pengalihan arus lalu lintas
Treatment Recommendation	7.0

#### c) Berita : 3

Tanggal : Jumat, 16 Maret 2018 15:23 WIB

Judul : Protes Karikatur, Perwakilan FPI Bertemu Redaksi Majalah Tempo

"Perwakilan dari Front Pembela Islam (FPI) menemui manajemen redaksi Majalah Tempo tentang karikatur pria bersorban. Beberapa perwakilan masuk kedalam kantor Majalah Tempo di Jalan Palmerah Barat, Jakarta Selatan. Perwakilan dipimpin oleh Sekjen Persaudaraan Alumni 212 Bernard Abdul Jabar. Turut hadir pula Panglima Besar Laskar FPI Maman Suryadi. Sedangkan dari pihak Majalah Tempo diwakili Pemimpin Redaksi Arif Zulkifli. Para anggota FPI lainnya ikut masuk ke dalam ruangan.

"Kami pada intinya di sini merasa keberatan dengan karikatur Majalah Tempo yang menghina ulama kami," ujarBernard di awal pertemuan. Arif Zulkifli atau yang akrab disapa Azul memberikan penjelasan bahwa keberatan dari FPI diterima oleh redaksi. Azul mempersilakan FPI untuk menggunakan hak jawab.

"Ada mekanismenya. Saya persilakan bapak-bapak, ustad-ustad sekalian untuk memberikan hak jawab. Kami akan muat hak jawab itu selama itu tidak mengandung kata-kata kasar," ujar Arif. Sementara itu, sebagian besar massa aksi masih bertahan di depan kantor Majalah Tempo. Mereka menunggu hasil pertemuan tersebut.

Massa FPI meminta Tempo untuk meminta maaf tentang karikatur pria bersorban. Mereka merasa karikatur itu menghina Imam Besar FPI Habib Rizieq Shihab." (https://news.detik.com/berita/d-3920243/protes-karikatur-perwakilan-fpi-bertemu-redaksi-majalah-tempo, diakses 14 Juni 2019)

Define problem. Redaksi Tempo menerima perwakilan dari FPI untuk membicarakan kasus yang terjadi. Perwakilan dari FPI hanya terdiri dari beberapa orang saja yang di persilahkan untuk berbincang dengan pihak redaksi. Perwakilan dari FPI di pimpin oleh ketua alumni persaudaraan 212, Bernard Abdul Jabar dan panglima besar laskar FPI, Maman Suryadi. Dan dari pihak redaksi Tempo yang di pimpin oleh Arif Zulkifli. Seperti yang tertulis pada paragraf 1 dan 2.

"Perwakilan dari Front Pembela Islam (FPI) menemui manajemen redaksi Majalah Tempo tentang karikatur pria bersorban. Beberapa perwakilan masuk kedalam kantor Majalah Tempo di Jalan Palmerah Barat, Jakarta Selatan. Perwakilan dipimpin oleh Sekjen Persaudaraan Alumni 212 Bernard Abdul Jabar. Turut hadir pula Panglima Besar Laskar FPI Maman Suryadi. Sedangkan dari pihak Majalah Tempo diwakili Pemimpin Redaksi Arif Zulkifli."

*Diagnoses Cause.* Untuk menempuh jalan damai, pihak FPI dan redaksi menempuh jalur mediasi sebagai penyelesaian masalah yang sedang menimpa pihak redaksi dan pihak FPI yang merasa keberatan atas terbitnya karikatur tersebut yang dinilai sebagai penghinaan terhadap umat Islam khususnya ulama besar FPI. Seperti yang tertulis pada paragraf 3.

""Kami pada intinya di sini merasa keberatan dengan karikatur Majalah Tempo yang menghina ulama kami," ujarBernard di awal pertemuan. Arif Zulkifli atau yang akrab disapa Azul memberikan penjelasan bahwa keberatan dari FPI diterima oleh redaksi. Azul mempersilakan FPI untuk menggunakan hak jawab."

*Moral Judgment.* Di dalam berita ini tidak terdapat Moral Judgment.

*Treatment Recommendations.* Di dalam berita ini tidak terdapat treatment recommendations.

Tabel 3.1.2 Analisis berita 3

Material	Detik.com
Define Problem	Redaksi Tempo menerima perwakilan dari
	FPI untuk membicarakan kasus yang
IN A	terjadi. Perwakilan dari FPI hanya terdiri
1 m	dari beberapa orang saja yang di
	persilahkan untuk berbincang dengan
	pihak redaksi.
Diagnose Cause	merasa keberatan atas terbitnya karikatur
	tersebut yang dinilai sebagai penghinaan
17	terhadap umat Islam
Moral Judgment	
Treatment Recommendations	

d) Berita : 4

Tangal : Jumat, 16 Maret 2018 23:42 WIB

Judul : Soal Kartun, Tempo Minta Mediasi Dewan Pers

"Redaksi majalah Tempo mendorong protes FPI atas kartun pria bersorban diselesaikan ke Dewan Pers. Hal tersebut lantaran Dewan Pers dinilai memiliki kewenangan menilai produk jurnalistik sesuai dengan fungsi lembaganya.

"Dewan Pers adalah lembaga yang tepat menyelesaikan tafsir atas kerja jurnalistik yang menjadi produk berita," ujar Pemimpin Redaksi Majalah Tempo Arif Zulkifli dalam keterangan tertulis yang diterima **detikcom**, Jumat (16/3/2018). Arif mengatakan pihaknya sudah berdiskusi dengan perwakilan FPI terkait dimuatnya kartun pria bersorban pada majalah Tempo edisi 26 Februari 2018. Dalam diskusi tersebut, tambah Arif, FPI menuduh kartun itu melecehkan umat Islam karena menafsirkan orang berjubah tersebut adalah imam besar FPI Habib Rizieq Syihab.

Arif melanjutkan diskusi diakhiri dengan kesepakatan FPI mengajukan somasi, yang akan dimuat sebagai hak jawab pada majalah Tempo edisi pekan depan. Arif kemudian menjelaskan dirinya bertemu massa FPI setelah berdiskusi dan menyampaikan jalan penyelesaian melalui Dewan Pers.

"Kerja jurnalistik itu menyimpan dhaif (kekurangan) dan lembaga yang berwenang menilai kekurangan itu adalah Dewan Pers," kata Arif, seperti yang disampaikan kepada massa FPI.

Namun Arif menilai massa tak puas atas penjelasannya dan mendesaknya melontarkan permintaan maaf atas kartun pria bersorban itu. "Terhadap dampak yang diakibatkan atas pemuatan kartun itu, saya meminta maaf," sambung Arif. Masih dalam keterangan tertulis, Arif menuturkan seorang jurnalis bekerja berdasarkan fakta. "Kerja jurnalistik itu semata-mata menyandarkan pada fakta, tak kurang dan tak lebih. Namun, jika pencarian fakta-fakta itu dianggap keliru, Dewan Pers yang berwenang menilainya," tandas Arif. (aud/rna)"

(https://news.detik.com/berita/d-3921078/soal-kartun-tempo-minta-mediasi-dewan-pers, diakses pada Juni 2019)

Define Problem. Redaksi Tempo berusaha untuk membawa masalah karikatur tersebut ke Dewan Pers sebagai Lembaga yang mengerti atas kebenaran sekaligus kesalahan yang dilakukan oleh media pemberitaan di Indonesia. Dewan Pers juga merupakan sebuah Lembaga pengawas dan penanggung janggung jawab atas setiap penilaian karya jurnalistik di Indonesia. Seperti yang tertulis pada berita di paragraf 1.

"Redaksi majalah Tempo mendorong protes FPI atas kartun pria bersorban diselesaikan ke Dewan Pers. Hal tersebut lantaran Dewan Pers dinilai memiliki kewenangan menilai produk jurnalistik sesuai dengan fungsi lembaganya."

*Diagnoses Cause.* Arif Zulkifli menganggap bahwa massa pendemo tidak mendapatkan kepuasan atas penyelesaian kasus yang di hadapkan redaksi sehingga pihak pendemo mendesak redaksi untuk melontarkan kata maaf di depan peserta demo. Seperti yang tertulis pada berita di paragraf 4.

"Namun Arif menilai massa tak puas atas penjelasannya dan mendesaknya melontarkan permintaan maaf atas kartun pria bersorban itu."

*Moral Judgment.* Pihak redaksi Tempo berdiskusi kepada pihak FPI untuk tetap menyelesaikan masalah karikatur tersebut kepada dewan Pers, karena yang berhak menilai baik atau buruknya karya Jurnalistik adalah dewan Pers. Seperti yang tertulis di dalam berita paragraf 3.

"Arif kemudian menjelaskan dirinya bertemu massa FPI setelah berdiskusi dan menyampaikan jalan penyelesaian melalui Dewan Pers."

Treatment Recommendations. Di dalam berita ini tidak terdapat treatment recommendations.

Tabel 3.1.2 Analisis berita 4

Material	Detik.com
Define Problem	Redaksi majalah Tempo mendorong protes
	FPI atas kartun pria bersorban diselesaikan
	ke Dewan Pers
Diagnose Cause	massa tak puas atas penjelasannya dan
12-44(J)(J)(J)(J)	mendesaknya melontarkan permintaan
	maaf atas kartun pria bersorban itu
Moral Judgment	Arif kemudian menjelaskan dirinya
	bertemu massa FPI setelah berdiskusi dan
	menyampaikan jalan penyelesaian melalui
	Dewan Pers
Treatment Recommendations	-

e) Berita : 5

Tanggal: Jumat, 16 Maret 2018 17:32 WIB

Judul : Hak Jawab Akan Diterbitkan di Majalah Tempo, Massa FPI Bubar

"Setelah berdialog dengan Pemimpin Redaksi Majalah Tempo Arif Zulkifli, perwakilan Front Pembela Islam (FPI) Habib Novel Bamukmin dan Damai Lubis meminta massa membubarkan diri. Dalam pertemuan itu, Arif Zulkifli didampingi Pemred Koran Tempo Budi Setyarso dan Corporate Secretary Tempo Wahyu Muryadi.

"Nanti beli majalah Tempo sama-sama hari Senin untuk mengecek apakah memang surat yang disampaikan itu dimuat oleh Tempo," kata Damai Lubis dari atas mobil komando FPI, Jumat, 16 Maret 2018.

Sekitar pukul 16.30 peserta aksi damai mulai meninggalkan kantor Tempo di Jalan palmerah Barat No.8, Jakarta Selatan. Massa aksi yang berjumlah 200 orang berangsur membubarkan diri setelah mendapat penjelasan dari Pemred Majalah Tempo Arif Zulkifli.

Menurut Arif, sebagai sebuah karya jurnalistik seharusnya perkara karikatur yang disebutkan FPI sebagai Rizieq Shihab disampaikan melalui Dewan Pers. Proses yang harus dilewati di Dewan Pers bisa makan waktu lama, maka dalam edisi secepatnya akan dimuat hak jawab FPI. "Suratnya sudah diterima dan akan dimuat pada edisi Senin ini," kata Azul.

Unjuk rasa FPI ini menuntut Tempo meminta maaf atas kartun yang diduga Imam Besar FPI Rizieq Shihab dalam salah satu edisi Majalah Tempo. "Kami menuntut Tempo untuk meminta maaf," kata salah satu perwakilan FPI saat orasi."

(https://metro.tempo.co/read/1070408/hak-jawab-akan-diterbitkan-di-majalah-tempo-massa-fpi-bubar, diakses pada Juni 2019)

*Define Problem.* Setelah pihak FPI berdiskusi dengan pihak redaksi Tempo, Habib Novel Bamukmin meminta massa untuk sesegera membubarkan diri dari lokasi demo

tersebut. Karena pihak redaksi Tempo yang menyetujui akan memuat permintaan maaf yang akan di terbitkan pada majalah Tempo hari senin tanggal 19 Maret 2018. Hingga setelah mendengarkan pernyataan pihak redaksi Tempo, massa mulai membubarkan diri pada pukul 16:30 WIB. Seperti yang tertulis pada berita di paragraf 2.

""Nanti beli majalah Tempo sama-sama hari Senin untuk mengecek apakah memang surat yang disampaikan itu dimuat oleh Tempo," kata Damai Lubis dari atas mobil komando FPI, Jumat, 16 Maret 2018. Sekitar pukul 16.30 peserta aksi damai mulai meninggalkan kantor Tempo di Jalan palmerah Barat No.8, Jakarta Selatan. Massa aksi yang berjumlah 200 orang berangsur membubarkan diri setelah mendapat penjelasan dari Pemred Majalah Tempo Arif Zulkifli."

*Diagnose Cause.* Massa FPI yang menuntut kepada pihak redaksi yang sesegera mungkin untuk meminta maaf kepada umat muslim karena sudah melecehkan khususnya ulama besar Habib Rizieq Shihab. Massa menuntut permintaan maaf yang di terbitkan di dalam majalah Tempo. Seperti yang tertulis pada berita di paragraf 4.

"Unjuk rasa FPI ini menuntut Tempo meminta maaf atas kartun yang diduga Imam Besar FPI Rizieq Shihab dalam salah satu edisi Majalah Tempo. "Kami menuntut Tempo untuk meminta maaf," kata salah satu perwakilan FPI saat orasi.

Moral Judgment. Di dalam berita ini tidak terdapat Moral Judgment.

*Treatment recommendations*. Redaksi Tempo akan menerbitkan hak jawab FPI atas permasalahan karikatur yang akan di terbitkan di majalah Tempo edisi senin 19 Maret 2018 sesuai dengan apa yang sudah di diskusikan antara FPI dan Tempo pada saat hari demo tersebut. Seperti yang tertulis dalam berita di paragraf 3.

"maka dalam edisi secepatnya akan dimuat hak jawab FPI. "Suratnya sudah diterima dan akan dimuat pada edisi Senin ini."

Tabel 3.1.2 Analisis Berita 5

Tempo.co

Define Problem	Sekitar pukul 16.30 peserta aksi damai mulai		
	meninggalkan kantor Tempo di Jalan		
	palmerah Barat No.8, Jakarta Selatan. Massa		
	aksi yang berjumlah 200 orang berangsur		
	membubarkan diri		
Diagnose Cause	Kami menuntut Tempo untuk meminta maaf,		
121	kata salah satu perwakilan FPI saat orasi.		
Moral Judgment			
Treatment Recommendations	maka dalam edisi secepatnya akan dimuat hak		
1 4	jawab FPI. "Suratnya sudah diterima dan akan		
	dimuat pada edisi Senin ini		



3. Kategori "Informasi Publik"

a) Berita

: 1

Tanggal

: Jumat, 16 Maret 2018 20:04 WIB

Judul

: FPI Demonstrasi: Kartunis Jitet Tanggapi Kartun Tempo

"Kartunis senior asal Semarang, Jitet Koestana, menilai tak ada masalah dalam

kartun di majalah Tempo, yang diprotes Front Pembela Islam atau FPI.

"Untuk karikatur itu, aku justru seneng. Terhibur, Apik. OK. Karikatur yang pintar

dan lucu. Ketika yang dikarikaturkan seorang kartunis. Aku misalnya. Aku tertawa,

karena lucu. Jadi tidak masalah," kata Jitet dalam keterangan tertulis yang

diterima Tempo hari ini, Jumat, 16 Maret 2018.

Menurut dia, kartun tersebut mengambil ide dari parodi dialog tokoh Rangga dan

Cinta dalam film Ada Apa Dengan Cinta II. Jitet juga tidak melihat adanya unsur

pelecehan agama dalam kartun yang dimuat Tempo itu. Kartun tersebut juga tidak

menampilkan wajah yang mengarah kepada seseorang, "Tidak ada siapa pun.

Tidak ada nama. Apakah semua yang memakai baju putih itu habib?" ujarnya.

Sebanyak 200 massa FPI mendatangi Gedung Tempo siang tadi. Mereka

menganggap kartun yang dimuat majalah Tempo edisi 26 Februari 2018 adalah

penghinaan bagi ulama, yakni pemimpin FPI, Rizieq Shihab. Dalam perundingan

dengan Tempo disepakati bahwa masalah ini akan diselesaikan lewat Dewan Pers,

dan FPI dipersilakan memberikan tanggapan atau hak jawab terkait dengan

kartun itu.

Jitet berpendapat segala sesuatu tidak perlu dikaitkan dengan agama karena justru

akan berbahaya. Karena itu, tak ada yang perlu dirisaukan sehingga seharusnya

tidak perlu ada unjuk rasa menyikapi kartun tersebut karena memang tidak ada

masalah.

"Misalnya aku dikritik. Kalau benar, maka yang perlu dilakukan adalah introspeksi

diri," ucap Jitet.

61

Adapun Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers berpendapat karikatur yang dibuat Tempo merupakan sebuah karya jurnalistik. Semua karya jurnalistik dilindungi undang-undang dan konstitusi, khususnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Pasal 28 F Undang-Undang Dasar 1945.

"Pers adalah lembaga kontrol yang menjunjung tinggi nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum dan hak asasi manusia, serta menghormati kebinekaan," kata Direktur Eksekutif LBH Pers Nawawi Bahrudin dalam keterangan tertulis tentang protes FPI yang diterima Tempo."

(https://metro.tempo.co/read/1070456/fpi-demonstrasi-kartunis-jitet-tanggapi-kartun-tempo, diakses pada 14 Juni 2019)

*Define Problem.* Kartunis asal Semarang, Jitet Koestana, menganggap bahwa konten karikatur yang dimuat di majalah Tempo tidak ada masalah sehingga tidak perlu terjadinya demontrasi yang dilakukan FPI kepada piak redaksi Tempo pada tanggal 16 Maret 2018. seperti yang tertulis pada berita di paragraf 1.

"Kartunis senior asal Semarang, Jitet Koestana, menilai tak ada masalah dalam kartun di majalah Tempo, yang diprotes Front Pembela Islam."

Diagnose Cause. Menurut Jitet Koestana, konten karikatur tersebut tidak mengandung unsur agama bahkan sampai melecehkan pihak ulama, karena di karikatur tersebut tidak ada wajah yang pasti, dan karikatur tersebut menggunakan parodi yang digunakan Rangga dan Cinta dalam Film "Ada Apa Dengan Cinta II." Di dalam gambar tersebut juga tidak menjurus kepada Habib Rizieq Shihab. Gambar tersebut hanya menggambarkan seorang pria menggunakan baju berwarna putih dan seorang wanita. Seperti yang tertulis pada berita di paragraf 2.

"Menurut dia, kartun tersebut mengambil ide dari parodi dialog tokoh Rangga dan Cinta dalam film Ada Apa Dengan Cinta II. Jitet juga tidak melihat adanya unsur pelecehan agama dalam kartun yang dimuat Tempo itu. Kartun tersebut juga tidak menampilkan wajah yang mengarah kepada seseorang. "Tidak ada siapa pun. Tidak ada nama. Apakah semua yang memakai baju putih itu habib?" ujarnya."

Moral Judgment. Kartunis tersebut menganggap bahwa sesuatu berita tidak perlu di sambungkan dengan sebuah isu yang membawa agama kedalam isu tersebut, apalagi hingga mengerucut kepada tokoh yang di banggakan, itu sangat berbahaya. Karena isu agama sendiri masih sangat gampang untuk "di olah" di negara ini. Dan Jitet sendiri menganggap kalau emang benar itu sebuah kritikan, maka hal yang tepat adalah melakukan introspeksi diri. Bukan dengan membela apalagi kalau sampai melakukan demo. Seperti yang tertulis pada berita di paragraf 4.

"Jitet berpendapat segala sesuatu tidak perlu dikaitkan dengan agama karena justru akan berbahaya. Karena itu, tak ada yang perlu dirisaukan sehingga seharusnya tidak perlu ada unjuk rasa menyikapi kartun tersebut karena memang tidak ada masalah. "Misalnya aku dikritik. Kalau benar, maka yang perlu dilakukan adalah introspeksi diri," ucap Jitet."

Treatment Recommendations. Di dalam berita ini tidak terdapat treatment recommendations.

Tabel 3.1.3 Analisis berita 1

Elements	Tempo.co
Define Problem	Tak ada masalah dalam kartun di majalah
	Tempo, yang diprotes Front Pembela Islam
Diagnose Cause	Jitet juga tidak melihat adanya unsur
10 //	pelecehan agama dalam kartun yang dimuat
	Tempo itu
Moral Judgment	tidak perlu ada unjuk rasa menyikapi kartun
15 BUNG	tersebut karena memang tidak ada masalah.
	"Misalnya aku dikritik. Kalau benar, maka
	yang perlu dilakukan adalah introspeksi diri
Treatment Recommendations	-

b) Berita : 2

Tanggal : Jumat, 16 Maret 2018 13:48 WIB

Judul : Kartun 'Pria Bersorban Tak Jadi Pulang' Diprotes FPI, Ini Kata Tempo

"FPI memprotes kartun 'Pria Bersorban Tak Jadi Pulang' yang ada di Majalah Tempo. Pemred Majalah Tempo Arif Zulkifli terbuka untuk berdialog dengan FPI. "Tempo akan menerima utusan FPI yang datang," ujar Arif ketika dikonfirmasi, Jumat (16/3/2018). FPI berencana melakukan aksi damai di kantor Majalah Tempo di kawasan Palmerah, Jakarta Barat siang ini. Selain siap menerima utusan FPI, kata Arif, Tempo juga membuka diri untuk diskusi.

"Kami terbuka terhadap dialog, termasuk untuk mendiskusikan hasil kerja jurnalistik yang kami lakukan," ujar pria yang akrab disapa Azul ini. Diberitakan sebelumnya, massa Laskar Pembela Islam (LPI) dan Front Pembela Islam (FPI) akan meminta redaksi majalah Tempo mengklarifikasi berkaitan dengan karikatur ulama yang menjadi cover majalah Tempo edisi 26 Februari 2018.

"Yang pasti Tempo telah menghina ulama makanya kami menuntut Tempo minta maaf kepada umat Islam dan ulama. Makanya, kami akan minta klarifikasi atas karikatur itu," kata Humas Persaudaran Alumni 212 yang juga anggota FPI, Novel Bamukmin.

Menurut Novel, karikatur tersebut menggambarkan seorang ulama berpakaian gamis dan bersorban. Di depan sosok ulama itu terdapat seorang perempuan yang dianggap menggunakan pakaian yang tidak sopan. "Itu jelas ulama berpakaian memakai gamis, berimamah dan bersorban yang haram berdua berhadapan dengan wanita yang berpakaian tidak sopan, apalagi ditambah dengan kata-kata yang tak pantas," ujar Novel."

(https://news.detik.com/berita/d-3920021/kartun-pria-bersorban-tak-jadi-pulang-diprotes-fpi-ini-kata-tempo, diakses pada Juni 2019)

*Define Problem.* FPI yang akan melakukan aksi di depan kantor Tempo pada hari Jum'at tanggal 16 Maret 2018 di kantor redaksi Tempo yang beralamat di Palmerah, Jakarta atas dalih protes terhadap karikatur pria bersorban putih yang di duga adalah

Habib Rizieq Shihab saat terbit di majalah Tempo. Seperti yang tertulis pada berita di paragraf 1.

"FPI memprotes kartun 'Pria Bersorban Tak Jadi Pulang' yang ada di Majalah Tempo"

*Diagnose Cause.* Massa dari FPI dan LPI yang akan meminta redaksi Tempo untuk segera mengklarifikasi atas terbitnya karikatur pria bersorban putih yang diduga sebagai Habib Rizieq Shihab, yang terbit pada cover majalah Tempo edisi 26 Februari 2018. Seperti yang tertulis pada berita di paragraf 3.

"Diberitakan sebelumnya, massa Laskar Pembela Islam (LPI) dan Front Pembela Islam (FPI) akan meminta redaksi majalah Tempo mengklarifikasi berkaitan dengan karikatur ulama yang menjadi cover majalah Tempo edisi 26 Februari 2018."

Moral Judgment. Di dalam berita ini tidak terdapat moral judgment.

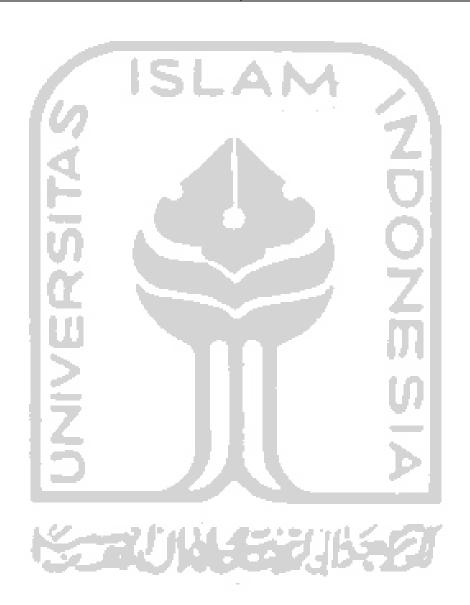
*Treatment Recommendations.* Pihak redaksi Tempo akan menerima sekaligus mengundang kepada pihak pendemo untuk berdiskusi sekaligus menerangkan klarifikasi atas karikatur pria bersorban putih yang di duga pihak pendemo yakni Habib Rizieq Shihab. Seperti yang tertulis pada berita di paragraf 2.

"Kami terbuka terhadap dialog, termasuk untuk mendiskusikan hasil kerja jurnalistik yang kami lakukan,"

Tabel 3.1.3 Analisis Berita 2

Material	Detik.com	
Define Problem	FPI memprotes kartun 'Pria Bersorban Tak	
	Jadi Pulang' yang ada di Majalah Tempo	
Diagnose Cause	Laskar Pembela Islam (LPI) dan Front	
	Pembela Islam (FPI) akan meminta redaksi	
majalah Tempo mengklarifikasi ber		
	dengan karikatur ulama yang menjadi cover	
	majalah Tempo	

Moral Judgment	-	
Treatment Recommendations	Kami terbuka terhadap dialog, termasuk untuk	
	mendiskusikan hasil kerja jurnalistik yang	
	kami lakukan	



### B. Pembahasan

Dalam pembahasan ini, penulis akan menggunakan paradigma konstruktivisme dalam setiap berita yang penulis analisis dari kedua media yang penulis teliti. Analisis ini akan melihat bagaimana media mengkonstruksi berita atas kasus karikatur pria bersorban putih yang di permasalahkan FPI kepada redaksi Tempo pada jumat 16 Maret 2018. Penulis akan membahas dari setiap kategori yang tertera pada berita.

## 1. Kategori "Tindakan Lembaga Pers"

Pada Tempo.co, di dalam kategori ini terdapat banyak perbandingan yang dimuat dalam setiap berita yang tertulis. Pada kategori ini, media lebih menekankan kepada pihak pendemo yang tidak mengerti akan hal yang berkaitan dengan kebebasan berpendapat yang dimiliki oleh semua warga negara termasuk kepada Pers. Dalam kategori ini penulis menemukan banyak tulisan yang memfokuskan kepada pihak FPI yang telah melakukan demonstrasi kepada pihak redaksi Tempo dalam kurun waktu beberapa jam, pada tanggal 16 Maret 2018 di kantor redaksi Tempo di Palmerah, Jakarta Selatan.

Adapun pernyataan langsung dari setiap narasumber yang memfokuskan kesalahan FPI yang telah mendemo pihak redaksi Tempo.

"sebagai aksi yang tidak memahami Undang-Undang Pers. Sebab, pengerahan massa untuk memaksa media mengakui kesalahan karya jurnalistik adalah sikap yang anti demokrasi dan anti kebebasan pers."

Dari setiap berita yang mengandung unsur kategori ini, berita yang di munculkan terkait dengan sikap FPI yang melakukan hal dengan dalih tidak terima atas pelecehan kepada umat Islam yang di khususkan kepada para ulama sehingga para pendemo melakukan aksi tersebut untuk mendesak kepada pihak redaksi untuk segera meminta maaf kepada umat Islam di Indonesia. Berita yang di tonjolkan oleh Tempo adalah bagaimana sikap ketidak bebasan yang dimiliki Pers untuk menciptakan sebuah berita yang bisa dinikmati setiap pembaca untuk mengetahui informasi *update* yang terjadi di sekitar maupun di lingkungan negara.

Pada Detik.com, kategori ini merupakan sebuah bagaimana media membungkus sebuah berita kepada pembaca untuk bagaimana memfokuskan

penyelesaian dan beberapa solusi yang di munculkan untuk mencapai sebuah kata damai di dalam kasus yang sedang terjadi. Detik.com memfokuskan kepada bagaimana masyarakat bias mengetahui tanpa harus menyalahkan atau membenarkan kepada satu pihak. Detik.com mengangkat isu kasus tersebut untuk di sampaikan kepada presiden yang harus mengambil sikap atas ketidak bebasan Pers yang sedang terjadi.

"Menuntut kepada Presiden Jokowi untuk bersikap tegas untuk membela kebebasan pers dan kebebasan berekspresi sebagai wujud keberpihakan pada demokrasi dan HAM"

Isu yang di tonjolkan dalam berita detik.com adalah bagaimana untuk membela kebebasan pers, karena kebebasan Pers merupakan wujud dari sikap demokrasi yang dianut oleh setiap warga negara Indonesia dengan berdasar kepada aturan dan tata cara yang berlaku, tanpa terkecuali. Dan berita dengan judul "Koalisi Masyarakat Sipil Minta Jokowi Membela Kebebasan" tetap menekankan kepada presiden untuk membela kebebasan Pers, sehingga bukan hanya dari pihak yang terkena masalah saja yang mampu menyelesaikan, presiden sekalipun ikut membantu penyelesaian masalah yang merenggut kebebasan dari setiap orang untuk menyampaikan informasi.

## 2. Kategori "aksi protes, pengamanan, mediasi"

Pada Tempo.co, dalam kategori ini redaksi mengacu kepada bagaimana melakukan mediasi yang bertumpu kepada hak jawab yang akan di berikan FPI kepada redaksi Tempo. Dalam berita yang di terbitkan Tempo yang berjudul "Hak Jawab Akan Diterbitkan di Majalah Tempo, Massa FPI Bubar" berbicara kepada penyelesaian kasus yang melibatkan FPI untuk melihat bersama sama hak jawab yang akan di terbitkan pada majalah Tempo, karena jika melalui Dewan Pers bias memakan waktu yang cukup Panjang, maka dari itu redaksi akan menerbitkan hak jawab dari FPI dalam waktu yang secepatnya, yang tertulis pada berita.

"Nanti beli majalah Tempo sama-sama hari Senin untuk mengecek apakah memang surat yang disampaikan itu dimuat oleh Tempo," kata Damai Lubis dari atas mobil komando FPI"

"Proses yang harus dilewati di Dewan Pers bisa makan waktu lama, maka dalam edisi secepatnya akan dimuat hak jawab FPI"

Tempo berpendapat bahwa hak jawab yang akan dimuat dalam majalah merupakan sebuah keputusan bersama pada saat waktu demonstrasi terjadi di tanggal 16 Maret 2018.

Isu yang di munculkan pada berita tersebut merupakan bagaimana Tempo menjadikan solusi untuk melakukan damai kepada FPI dengan cara menerbitkan hak jawab di majalah Tempo itu sendiri, karena menurut Tempo jika hak jawab sudah di terima oleh redaksi Tempo, maka akan secepatnya hak jawab FPI atas kasus karikatur tersebut akan segera di terbitkan untuk dapat menyelesaikan masalah yang terjadi atas terbitnya karikatur tersebut.

Pada Detik.com, dalam kategori ini mengacu kepada sebuah bagaimana gambaran saat terjadi demonstrasi di kantor redaksi Tempo, dengan menerbitkan sebuah berita yang berjudul; "Protes Karikatur, Perwakilan FPI Bertemu Redaksi Majalah Tempo".

Berita tersebut menonjolkan bagaimana jurnalis mengedepankan saat situasi pertemuan antara redaksi Tempo dengan FPI di dalam sebuah ruangan yang melibatkan petinggi antara 2 pihak tersebut. Dan detik memframing berita tersebut lebih menonjolkan situasi pertemuan FPI dengan redaksi Tempo yang membicarakan bagaimana sebuah penyelesaian yang harus ditempuh pihak Tempo atas terbitnya karikatur Rizieq Shihab pada majalah Tempo.

"Perwakilan dipimpin oleh Sekjen Persaudaraan Alumni 212 Bernard Abdul Jabar. Turut hadir pula Panglima Besar Laskar FPI Maman Suryadi" "Sedangkan dari pihak Majalah Tempo diwakili Pemimpin Redaksi Arif Zulkifli. Para anggota FPI lainnya ikut masuk ke dalam ruangan"

Dari berita diatas sangat terlihat jelas bagaimana media Detik melihat dari sisi pertemuan yang terjadi untuk menginformasikan kepada pembaca bahwa saat demo yang terjadi pada saat itu merupakan demonstrasi yang berjalan damai, tanpa adanya kericuhan atau "Chaos" saat di lokasi demo tersebut, karena massa berpendapat bahwa aksi tersebut merupakan aksi damai.

# 3. Kategori "Informasi Publik"

Pada Detik.com, dalam kategori ini redaksi menonjolkan tentang bagaimana reaksi dari pihak pendemo atas kasus karikatur tersebut hingga mendatangkan sekitar ratusan orang untuk melakukan aksi di depan kantor redaksi Tempo pada hari jumat, 16 Maret 2018 di Palmerah, Jakarta. Dan Detik memunculkan beberapa pendapat narasumber yang keberatan atas terbitnya karikatur tersebut.

""Yang pasti Tempo telah menghina ulama makanya kami menuntut Tempo minta maaf kepada umat Islam dan ulama. Makanya, kami akan minta klarifikasi atas karikatur itu," kata Humas Persaudaran Alumni 212 yang juga anggota FPI, Novel Bamukmin."

Detik memframing berita yang menonjolkan bagaimana tindakan yang dilakukan oleh pihak pendemo kepada redaksi Tempo waktu itu dengan cara melakukan demonstrasi yang bertujuan menekan redaksi Tempo agar segera meminta maaf kepada umat Islam karena karikatur tersebut merupakan Habib Rizieq Shihab yang menjadi kartun dalam karikatur tersebut.

Pada Tempo.co, di dalam kategori ini menonjolkan bagaimana reaksi reaksi seorang kartunis senior asal Semarang yang bernama, "Jitet Koestana" yang berpendapat bahwa kartun tersebut dinilai tidak ada masalah sama sekali, karena disitu tidak menampilkan wajah dari yang diduga oleh pihak pendemo yakni, Habib Rizieq Shihab.

Dan di dalam karikatur tersebut, Jitet Koestana berpendapat bahwa itu kartun yang lucu, menghibur, apik, OK, dan itu hanya sebuah kartun biasa yang

seharusnya tidak perlu melakukan sebuah aksi demonstrasi yang berujung mengintimidasi pihak redaksi Tempo untuk sesegera mungkin meminta maaf kepada umat muslim.

"Kartunis senior asal Semarang, Jitet Koestana, menilai tak ada masalah dalam kartun di majalah Tempo, yang diprotes Front Pembela Islam"

"Untuk karikatur itu, aku justru seneng. Terhibur. Apik. OK. Karikatur yang pintar dan lucu. Ketika yang dikarikaturkan seorang kartunis. Aku misalnya. Aku tertawa, karena lucu. Jadi tidak masalah"

# C. Perbandingan antar media

Masing-masing media memang berbeda dalam mengonstruksi realitas. Terbukti dari penelitian yang penulis lakukan, Tempo.co dan Detik.com berbeda dalam memberitakan isu yang sama, Karikatur Pria Bersorban Putih. Bahkan dengan beberapa sumber yang sama. Secara garis besar, perbedaan kedua media yang penulis teliti bisa dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.3.1 Perbandingan Antar Media

Media	Tempo.co	Detik.com
Define Problem	Lebih menekankan kepada	Kasus demo karikatur Pria
17	bagaimana ketidak bebasan	Bersorban Putih merupakan
14	dalam berdemokrasi di	sebuah tindakan yang
10	tegakan untuk semua	merugikan
	kalangan warga negara	
Diagnose Cause	Kurangnya pemahaman	Melakukan hal yang
. 7	pihak pendemo atas UU Pers	mengintimidasi pihak lawan
Moral Judgment	Bagaimana kritik harus tetap	Penolakan gambar karikatur
	di lakukan sebagai hasil	yang mengakibatkan
	karya cipta Jurnalistik	terganggu lokasi sekitar.
		Pihak ke polisian yang
		melakukan rekayasa lalu
		lintas di wilayah sekitar

Treatment Recomendations	Melakukan diskusi sebagai	Masalah kasus tersebut di
	penyelesaian masalah kedua	selesaikan melalui dewan
	belah pihak yang	Pers, karena dewan Pers
	menghadirkan perwakilan	yang berhak menyelesaikan
	dari setiap pihak.	masalah di dalam Pers.

Dari kedua media online tersebut terlihat perbedaan cara memberitakan kasus tersebut. Tempo cenderung melihat bagaimana karikatur tersebut dinilai sebagai hal yang biasa dan tidak ada masalah sama sekali. Dan dari karikatur tersebut merupakan hal yang benar, karena mengandung sebuah kritik kepada seorang tokoh yang salah satunya mampu mewujudkan penegakan demokrasi bagi semua warga negara dalam menciptakan sebuah karya maupun menyampaikan pendapat ataupun informasi yang di dapatkan, tanpa terkecuali Pers juga termasuk dalam warga negara yang mampu menyampaikan pendapat atas informasi kepada semua warga negara.

Detik yang menonjolkan bagaimana reaksi dari pihak pendemo yang melakukan aksi karena sebuah kasus karikatur yang menimpa imam besarnya dan dianggap melecehkan seluruh umat Islam yang di framing dalam sebuah berbagai berita yang di terbitkan oleh media Detik, dari mulai massa yang dating hingga masa yang mulai membubarkan diri. Detik melakukan agenda setting dalam pemberitaan yang di terbitkan, bagaimana menciptakan berita yang mengabarkan kondisi di lokasi.

